

Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Sri Hudiari¹, Galuh Kartiko², Moh Sinal³

^{1,2,3}UPT MKU Politeknik Negeri Malang

¹Email: hudiari¹@gmail.com

Abstract

This article examines citizenship education which has a strategic role in shaping citizens to be democratic. It can be said that by providing learning about civic education which is an activity to develop in students a democratic culture, abilities and skills in interacting and the ability to make rational decisions. The problem in this article is about the efforts made by the teachers of the Citizenship Education course at the State Polytechnic of Malang in order to develop democratic values for their students, as well as some of the obstacles faced and also the solutions to overcome them. In the Malang State Polytechnic campus, its implementation has the aim that students as the younger generation who are agents of change will have an attitude that is able to consciously uphold democratic values, form leadership characters and can produce students who have personal and social skills so that they can become good citizens (good care or good citizen). This article uses a qualitative descriptive type of research. The types of data that researchers use include primary data derived from observations on campus and the experience of researchers as well as secondary data by using relevant literature or literature in the form of books, notes, documents, journals. So it can be concluded that the civic education taught will have an important influence in order to provide real enlightenment and be able to produce students who can develop democratic values in their lives.

Keywords: *Values, Democracy, Education, Citizenship*

Abstrak

Artikel ini mengkaji mengenai peran startegis dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya membentuk warga negara agar mampu bersikap demokratis. Dapat dikatakan bahwa dengan memberikan pembelajaran mengenai Pendidikan kewarganegaraan yang merupakan suatu kegiatan untuk mengembangkan pada diri peserta didik kultur demokrasi, kemampuan dan skill dalam berinteraksi dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara rasional. Permasalahan dalam artikel ini adalah mengenai upaya yang dilakukan para pengajar dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Politeknik Negeri Malang dalam rangka mengembangkan nilai - nilai demokrasi kepada para mahasiswanya, demikian pula dengan beberapa kendala yang dihadapi serta juga solusi dalam mengatasinya. Di lingkungan kampus Politeknik Negeri Malang, penerapannya mempunyai tujuan supaya mahasiswa sebagai generasi muda yang merupakan *agent of change* akan mempunyai sikap yang mampu secara sadar menjunjung nilai-nilai demokrasi, membentuk karakter kepemimpinan dan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki keterampilan pribadi dan sosial sehingga dapat menjadi warga negara yang baik (*good care* atau *good citezen*). Artikel ini menggunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. Jenis data yang peneliti gunakan meliputi data primer yang berasal dari hasil pengamatan di kampus dan pengalaman peneliti serta data sekunder dengan menggunakan literatur atau kepustakaan baik berupa buku, catatan, dokumen, jurnal yang relevan. Sehingga kiranya dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan akan membawa pengaruh yang cukup penting dalam rangka memberikan pencerahan secara nyata dan mampu menghasilkan mahasiswa yang bisa mengembangkan nilai - nilai demokrasi dalam kehidupannya.

Kata Kunci : Implementasi, Nilai, Demokrasi, Pendidikan, Kewarganegaraan

Pendahuluan

Negara Indonesia sudah cukup lama menjalankan ide tentang demokrasi, walaupun masih pada tingkatan yang sederhana dan belum sampai mencakup demokrasi dalam tingkat kenegaraan secara keseluruhan. Demokrasi pada masa itu sering disebut dengan demokrasi asli yang diwujudkan dengan kegiatan rapat rembug desa, gotong-royong, pemilihan kepala desa dan lain-lain. Pada masa modern ini, Indonesia telah mengembangkan sistem demokrasi yang telah disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman (Paramita:2016).

Terdapatnya pemahaman mengenai demokrasi maupun penerapan nilai – nilainya di Indonesia, memungkinkan timbulnya pendapat bahwa demokrasi adalah ajaran mengenai kebebasan yang tanpa batas atau sangat luas sehingga telah menimbulkan suasana yang kurang kondusif bahkan muncul ketidaknyamanan dalam masyarakat. Misalnya terdapat konflik baik secara vertical maupun horizontal, tindakan anarkhis, adanya kekerasan, fasilitas umum yang mengalami kerusakan, yang semua itu mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Disamping hal tersebut, masih terdapat masyarakat yang belum mengerti dan mengaplikasikan perilaku demokrasi secara benar. Pelaksanaan demokrasi yang benar apabila masyarakat secara keseluruhan dapat menyampaikan aspirasinya tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun atau pihak manapun. Dikarenakan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara tidak akan dapat terjadi tanpa adanya perilaku yang demokratis dari warga masyarakatnya.

Menurut Azra Azyumardi, meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia

belakangan ini, sebagian besarnya bersumber dari konflik di antara elit politik yang tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Jika salah satu esensi demokrasi dan politik adalah “*art of compromise*” dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justru menyaksikan kian meningkatnya sikap “*pokoknya*” pada kalangan elit politik dan massa. Lebih celaka lagi sikap-sikap seperti itu kemudian diberi pengakuan keagamaan dan teologis oleh kalangan ulama, sehingga potensi kekerasan yang mengancam demokrasi semakin menguat lagi.

Fenomena ini sering terjadi pada masyarakat dimana dapat dikatakan bahwa kesadaran dan semangat belum sepenuhnya terwujud. Aksi politik beberapa kader partai terbesar dan paling demokratis itu tampaknya masih terlalu fokus pada sikap tradisional, termasuk posisi komunal dalam isu kebebasan dan toleransi antar umat beragama. Demikian juga dengan timbulnya bentuk kekerasan politik yang terjadi di masyarakat untuk menyelesaikan masalah, seperti menganggap perbedaan sebagai konflik, cara bersikap dan bertindak secara totaliter, berperilaku anarkis adalah gambaran lain yang kasat mata tentang hal itu. Kenyataan ini sesungguhnya bisa dimaklumi karena warisan masa lampau baik itu orde lama maupun orde baru yang tidak mendukung terjadinya proses demokrasi, dan juga kurangnya andil pendidikan dalam menyemaikan kultur demokrasi, bahkan pendidikan yang diharapkan memberikan kontribusi bagi tumbuhnya kultur demokrasi dijadikan alat pembrangus demokrasi (Tukiran: 2016)

Oleh karena itu pemahaman mengenai demokrasi perlu untuk dilakukan, salah satunya dengan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Yang bertujuan supaya masyarakat dapat memahami dan mengamalkannya dengan benar. Melalui pendidikan, manusia dapat memecahkan masalah kehidupan dan mengantisipasi perubahan dan kemajuan di masa depan. Pendidikan memajukan dan mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang kehidupan berbangsa guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa.

Permasalahan dalam artikel ini adalah mengenai bagaimana upaya yang dilakukan para pengajar dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Politeknik Negeri Malang dalam rangka mengembangkan nilai - nilai demokrasi kepada para mahasiswanya. Demikian pula dengan beberapa kendala yang dihadapi serta juga solusi dalam mengatasinya.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap para dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Polinema dalam upaya mengembangkan nilai - nilai demokrasi kepada para mahasiswanya. Demikian pula dengan beberapa kendala yang menjadi permasalahannya. Sedangkan manfaat secara praktis yang akan diperoleh, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang terkait dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan sikap demokratis dari mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Malang.

Kajian Literatur

Istilah dari demokrasi bukanlah suatu hal yang baru kita dengar, namun kita sudah seringkali mengucapkannya. Secara etimologis atau dari sudut Bahasa, istilah ini berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari kata *Demos* yang artinya rakyat dan *cratein* atau *cratos* yang mempunyai arti pemerintahan. Jadi dengan merujuk

pada pengertian etimologis ini, demokrasi adalah perihal penyelenggaraan kekuasaan dalam sejarah kehidupan politik manusia. (Winarno:2019).

Di dalam demokrasi itu sendiri, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang senantiasa dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh setiap warganegara. Sebagai wujud real pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat ialah dengan melibatkan atau mengikutsertakan warga negara Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik. (Kadek Radhitya : 2019)

Menurut Nasiwan, yang dimaksud dengan demokrasi tidak sekedar dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat atau keterlibatan langsung rakyat dalam mengambil keputusan politik, namun lebih dari itu. Demokrasi di dalamnya menyangkut kondisi yang kondusif untuk mensosialisasikan pendidikan nilai - nilai yang menjadi harapan dan dambaan. Oleh karena itu demokrasi tidak hanya merujuk pada kondisi realitas tatanan atau sistem yang sudah ada, pendidikan demokrasi harus mampu melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam arti lebih spesifik dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk mengubah proses sosialisasi demokrasi dalam masyarakat sehingga mereka betul-betul memahami sistem demokrasi yang ideal dan hendak diwujudkan (Sigit Kusnahradi : 2007).

Demokratis adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokratis merupakan kata sifat demokrasi. Warga negara yang demokratis adalah warga negara yang memiliki perilaku hidup yang baik dalam kehidupan pribadi maupun kenegaraan dengan memegang

nilai-nilai demokrasi. Mengutip buku Semua Berakar Pada Karakter, sifat demokratis adalah sifat yang terbuka, sportif, damai, tidak memaksakan pendapat, bertanggung jawab, dan tidak melanggar hak orang lain. Contoh sikap demokratis adalah menghargai perbedaan, penyampaian pendapat dengan cara-cara yang benar, serta menghargai keputusan musyawarah. Di lingkungan sekolah, sikap demokratis ditunjukkan dalam pemilihan ketua kelas yang melibatkan semua peserta didik di kelas untuk mencapai kesepakatan.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Menjadikan warga negara yang demokratis tentu memerlukan upaya serius dan sistematis dari negara.

Jadi, pesan dari pendidikan ini adalah penentu suatu masyarakat apakah benar-benar dapat maju dan berkembang, atau sebaliknya. Masyarakat dapat menjadi suatu bentuk yang sedang atau memiliki kemampuan dan otoritas untuk membuat dirinya otonom secara bebas dan menentukan berbagai keputusan sosial, budaya dan politik. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat umum dapat berpartisipasi dalam dunia politik dengan cara yang bermanfaat, berpartisipasi dalam penetapan kebijakan umum,

menanamkan nilai dan norma berdasarkan landasan dan motivasi bangsa Indonesia, serta memajukan diri dalam pembangunan negara dan kehidupan negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi politik menjadi salah satu tolak ukur yang ada dalam demokrasi dan menjadi sangat krusial dalam menghidupkan roh demokrasi dinegara ini. (Supratiwi dkk : 2021)

Partisipasi generasi baru dalam sistem politik yang demokratis akan terjadi apabila generasi baru memiliki kualitas dan kemampuan yang diantaranya memiliki identitas diri termasuk komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas dan kemampuan untuk berkelompok secara terorganisir dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kesadaran bahwa kebijakan yang diputuskan dalam proses politik baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh informasi guna memberikan pedoman dalam kehidupan sosial politik, termasuk di dalamnya memahami demokrasi (Tukiran : 2016).

Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional kita mengatakan bahwa pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik.

Pendidikan seharusnya membawa peserta didik kearah kedewasaan, kemandirian dan bertanggung jawab, tahu malu, tidak plin-plan, jujur, santun,

berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur sehingga mereka tidak lagi bergantung kepada keluarga, masyarakat atau bangsa setelah menyelesaikan pendidikannya. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu konsep Pendidikan yang berfungsi untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang mempunyai karakter. Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik Warga Negara. Pendidikan menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Maksud dari pernyataan ini adalah agar manusia sebagai warga negara suatu negara yang baik, yang dapat melaksanakan semua kewajiban dan haknya secara baik. Melalui pendidikan dimaksudkan agar para warga negara ini menjadi patriotisme nasional. (Dwi Siswoyo:2013)

Berdasarkan Undang-Undang no. 20 tahun 2003 dan SK Dirjen DIKTI no. 43/DIKTI/Kep/2006, Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan salah satu mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Demikian pula dalam pasal 35 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "mata kuliah kewarganegaraan" adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Numan Somantri dalam Dikti (2014), pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelegence*), menumbuhkan partisipasi warga negara (*civic participation*) dan mengembangkan tanggungjawab warganegara untuk bela negara (*civic responsibility*). Warganegara yang cerdas diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara dan bangsanya. Melalui partisipasi warganegara akan membawa kemajuan negara, karena tidak ada satu negara pun di dunia maju tanpa partisipasi aktif dari warga negaranya. Begitu pula dengan tanggungjawab warganegara atas persoalan yang dihadapi negara dan bangsanya akan berkontribusi untuk kemajuan negara dan bangsanya. (Eko Budiono : 2015)

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, yakni menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadian menjadi warga negara Indonesia yang baik. Misionya membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya

secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan yang beradab.

Dengan visi dan misi di atas, kiranya pendidikan kewarganegaraan diharapkan berperan penting dalam memantapkan kepribadian manusia (dalam hal ini mahasiswa) seutuhnya, dalam arti memiliki keutuhan dan keterpaduan antara kemantapan unsur rohani dan unsur jasmaninya, sejahtera lahir dan bathin. Dengan kata lain, matakuliah pendidikan kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya. Eksistensi mahasiswa sebagai generasi muda merupakan ujung tombak harapan bangsa, mahasiswa adalah aset berharga untuk masa depan Indonesia.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. (Djam'an Satori : 2011).

Demikian pula terkait pendapat Sugiyono (2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan ataupun juga mendeskripsikan mengenai suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka - angka maupun bisa juga dengan memakai kata-kata (Punaji:2010).

Dan menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Spradley (Sugiyono : 2015) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Selanjutnya Sugiyono juga mengemukakan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dalam penelitian. Selain itu, sampel juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat

peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari observasi di kampus dan pengalaman peneliti sebagai pengajar Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, serta data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kepustakaan diantaranya berupa buku, buku catatan, dokumen, jurnal, dan laporan hasil penelitian sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Peran mahasiswa dalam politik di masyarakat tidak lepas dari perwujudan pentingnya pendidikan bagi mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa didorong untuk melakukan tugas-tugas yang membuat mereka aktif di arena politik, seperti melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang inovatif berdasarkan perkembangan terkini, penelitian yang mengarah pada pengetahuan baru di lapangan, dan menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang pendidikan dan ilmu pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Pelaksanaan misi-misi tersebut harus terus dibarengi dengan kebijakan dan peraturan pimpinan kampus. Kesenambungan semua pihak dan kesadaran mahasiswa juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam berdemokrasi.

Terkait hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dengan melakukan wawancara dengan Ibu Khotbathul Laila, SH., MH dan Ibu Ariyanti, SH., LLM selaku dosen pengajar di Politeknik Negeri Malang, ada beberapa hal konkrit yang telah dilakukan dalam upaya pengembangan nilai-nilai demokrasi mahasiswa

melalui Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain:

- 1) Melakukan upaya untuk menumbuhkan kembangkan perilaku dalam menyampaikan pendapat. Hal tersebut biasa dilakukan dalam kegiatan diskusi di kelas. Yang mana mahasiswa diberikan kesempatan dalam upaya menyampaikan pendapatnya bisa berupa dukungan ataupun sanggahan mengenai materi diskusi yang disajikan. Demikian pula melalui pembelajaran secara kelompok juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi. Dan menerapkan *Student Center Learning*, pembelajaran yang tertuju pada mahasiswa. Sebagai pengajar mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan sikap untuk berani mengemukakan pendapat, untuk itu motivasi yang diberikan salah satunya adalah agar mahasiswa mau bertanya dan menjawab.
- 2) Membudayakan dan mengembangkan sikap toleransi. Melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh wadah organisasi, membiasakan hidup bersama-sama dengan berbagai kelompok tapi tidak menyebabkan konflik. Untuk mengembangkan sikap toleransi pada diri mahasiswa dapat dilakukan ketika proses diskusi ataupun tanya jawab ketika diskusi. Dimana mahasiswa tidak boleh memaksakan pendapatnya.
- 3) Menanamkan dan meningkatkan pola perilaku yang untuk saling menghormati, baik terhadap sesama mahasiswa ataupun dengan bapak dan ibu pengajar, misalnya dalam proses pembelajaran tidak ada

yang makan atau minum di kelas, jika ada yang terlambat datang maka diharapkan harus meminta maaf terlebih dahulu serta bisa memberikan alasannya sebelum dia duduk.

- 4) Membiasakan dan selalu memberikan kesempatan pada mahasiswa dengan hal - hal kecil untuk menumbuhkan rasa berpartisipasi dalam proses pembelajaran karena hal itu juga bertujuan untuk memajukan proses pembelajaran supaya lebih baik. Upaya untuk mengembangkan kebebasan berpartisipasi mahasiswa dapat dilakukan dengan cara kita sebagai pengajar memberikan tugas terstruktur sebagai bentuk partisipasi mereka dalam mengikuti kegiatan perkuliahan
- 5) Mengembangkan kebebasan kelompok, antara lain dengan menyediakan forum bagi organisasi, sehingga hak mahasiswa untuk berorganisasi dapat dikembangkan. Namun kebebasan itu ada batasnya, bukan kebebasan yang seluas-luasnya, kebebasan yang tidak mengganggu hak orang lain. Dan di dalam sebuah organisasi, aturan ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Aturan kemudian dibuat berdasarkan persetujuan anggota organisasi yang harus didefinisikan dengan tegas saat mereka muncul dan bertahan dalam organisasi
- 6) Menumbuhkan perilaku mampu bekerja sama dan mau bekerja sama. Untuk menumbuhkan sikap kooperatif di kalangan siswa dapat dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi. Dalam kelompok ini mahasiswa dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan materi

perkuliahan yang perlu diselesaikan. Dengan cara ini, siswa berusaha mencari solusi dari masalah yang diajukan bersama dengan siswa lain.

- 7) Meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa. Selain membangun hubungan kepercayaan di antara siswa, presentasi kelompok dapat membantu mencapai rasa percaya diri. Tempat dimana siswa dalam suatu kelompok dapat saling mengandalkan dan menciptakan rasa saling percaya. Keyakinan datang dari seberapa banyak yang kita ketahui. Percaya diri bukanlah pada tubuh kita, tetapi kepercayaan pada pengetahuan yang kita miliki.

Untuk kendala yang dihadapi dalam rangka pengembangan nilai demokrasi ini biasanya dikarenakan sikap egois dari mahasiswa yang berlebihan, dimana masing masing merasa dirinya paling baik atau benar, tidak mau bekerja sama dan tidak mau mengikutsertakan teman yang lain. Selain itu juga karena mahasiswa kurang menguasai ilmu yang telah diberikan sehingga dalam mengerjakan tugas kurang maksimal. Serta adanya ketidaksesuaian antara materi yang disampaikan di kampus dengan realita yang ada atau dapat dikatakan bahwa lingkungan tidak memberikan contoh yang baik. Sebagai contoh taat hukum, dosen berpesan kepada mahasiswa bahwa mereka harus taat hukum, namun pada kenyataannya terjadi kontradiksi sosial antara apa yang dikatakan dosen dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan munculnya krisis kepercayaan mahasiswa, karena tidak ada tindakan yang sesuai antara apa yang dijelaskan dosen di kelas dengan apa yang terjadi di lingkungan. Apa yang dijelaskan dosen di kelas dan apa

yang ditemukan siswa di masyarakat berbeda dengan teori yang telah diajarkan oleh dosen. Contoh lain adalah korupsi, sanksi hukum seharusnya dimaksimalkan, namun dalam praktiknya banyak pejabat korup yang tidak dihukum sesuai hukum yang berlaku.

Solusi dari berbagai permasalahan tersebut di atas diantaranya adalah dengan mengembangkan sikap bekerjasama antara seluruh kelompok mahasiswa dan kelembagaan mahasiswa yang ada di kampus. Memberikan hak yang sama sesuai dengan bagiannya. Perlu juga untuk terus memotivasi para mahasiswa bahwa jika mereka menjaga diri dan selalu yakin akan masa depan yang cerah, karena merekalah yang nantinya akan membangun bangsa ini. Dari observasi yang telah dilakukan, mahasiswa zaman dahulu dan sekarang memanglah berbeda. Oleh karena itu, untuk menjalin komunikasi yang baik perlu ditumbuhkan kesadaran dan minat setiap siswa. Belas kasih adalah rasa saling membantu, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal non fisik. Menumbuhkan sikap kebebasan kelompok dengan menyediakan tempat atau fasilitas seperti organisasi bagi siswa untuk mengembangkan haknya untuk berorganisasi. Kebebasan ini toidaklah lepas dari tanggung jawab setiap pribadi yang bersangkutan, misalnya dalam menjalankan hak kita sendiri, kita harus menghormati hak orang lain agar tidak terjadi penyimpangan atau inkonsistensi. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran juga bertujuan untuk menjadikan proses pembelajaran berjalan dengan baik.

Mahasiswa diberikan kesempatan dalam berpartisipasi pada berbagai kegiatan kampus, dengan cara

memberikan hak untuk menyampaikan aspirasinya misalnya dalam pemilihan ketua BEM ataupun ketua Himpunan mahasiswa lainnya. Menumbuhkan sikap persamaan hak dan kewajiban dalam mengikuti organisasi kemahasiswaan. Memfasilitasi kegiatan dan membina mahasiswa dalam upaya pengembangan dirinya melalui kerjasama antar kelompok atau organisasi kemahasiswaan dan melibatkan semua pihak di kampus. Dan di dalam suatu organisasi kemahasiswaan yang ada tersebut haruslah dibuat aturan yang jelas dan tepat sesuai dengan visi dan misi.

Demikian juga dalam proses pembelajaran, misalnya pengajar dalam memberikan tugas dilakukan secara kelompok, ini juga termasuk dalam bentuk pengembangan sikap kerjasama dengan teman, dimana mahasiswa pasti akan saling berdiskusi dan tidak mengerjakan sendiri-sendiri maka penulis sebagai pengajar memberikan aturan tata tertib dengan tujuan supaya mahasiswa jujur, disiplin, tepat waktu dalam setiap kegiatan yang melibatkan berlangsungnya proses pembelajaran.

Berdasarkan pengamatan peneliti, semua fasilitas dan kegiatan mahasiswa di Polinema sangat lengkap dan berkualitas untuk apabila digunakan mahasiswa sebagai sarana belajar dan mengembangkan potensinya. Seluruh sarana dan prasarana fisik maupun non fisik digunakan untuk mendukung berjalannya visi polinema, yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global yang senantiasa mengedepankan partisipasi aktif semua sivitas akademika untuk mencapai kemajuan bersama. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi Polinema, yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi yang berkualitas, inovatif, dan berdaya

saing yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan serta sesuai kebutuhan industri, lembaga pemerintah, dan masyarakat. Menyelenggarakan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan nilai demokrasi dalam lembaga kemahasiswaan mendorong individu sebagai warga negara untuk secara sukarela menempuh pendidikan demokrasi. Inilah keuntungan dari bentuk pendidikan demokrasi ini. Melalui dukungan ini, pendidikan demokrasi akan dapat berjalan lebih optimal. Selain kedua bentuk pendidikan demokrasi di atas, sumber informasi politik juga merupakan bentuk pendidikan demokrasi, misalnya semua informasi diperoleh melalui media massa, internet dan media sosial. Dalam kekacauan informasi yang melanda dunia digital saat ini, informasi politik ini dapat dipelajari lebih lanjut dan merupakan sumber belajar terpenting bagi individu untuk menerima pendidikan demokrasi. Pemuda terdidik ini memiliki peran dan fungsi yang lebih banyak dibandingkan warga negara lainnya.

Selanjutnya adalah mengenai pendidikan demokrasi yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan, dimana dalam hal tersebut, mahasiswa secara sosial dapat belajar melalui interaksi langsung dengan materi demokrasi yang lebih praktis. Perguruan tinggi perlu memfasilitasi berbagai peran bagi organisasi kemahasiswaan untuk dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan kampus. Penerapan pembelajaran secara kontekstual adalah konsep yang membantu pengajar dalam

menghubungkan apa yang mereka ajarkan antara situasi kehidupan nyata dan mendorong siswa untuk menghubungkan pengetahuan mereka dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini merupakan prosedur pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik memahami makna bahan pelajaran yang mereka pelajari, dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sendiri dalam keadaan pribadi, demokrasi sosial dan budaya masyarakat. (Jurnal Edueksos 2020).

Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan masyarakat yang beradab dan demokratis. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu dalam menempati posisi strategis dalam mempersiapkan generasi muda mahasiswa menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dengan mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan pribadi dan sosial dan menjadi warga negara yang baik (*good care atau good citizens*).

Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh pengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Politeknik Negeri Malang dalam upaya mengembangkan sikap demokratis mahasiswa adalah dengan melakukan upaya untuk menumbuhkan kembangkan perilaku dalam menyampaikan pendapat, membudayakan dan mengembangkan sikap toleransi, , mengembangkan perilaku saling hormat menghormati, menumbuhkan sikap kebebasan untuk bisa berperan atau

berpartisipasi secara aktif, mengembangkan kebebasan secara berkelompok, menumbuhkan perilaku untuk bisa dan suka menjalin kerja sama, meningkatkan sikap percaya diri mahasiswa.

Sedangkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh tenaga pengajar dalam mengembangkan sikap - sikap demokratis mahasiswa yaitu adanya sikap egois dari mahasiswa, dalam pengerjaan tugas mereka kurang maksimal dalam mengerjakan dikarenakan mahasiswa kurang membaca literatur dan penggunaan referensi. Selain itu juga kurang adanya ketidaksesuaian antara teori yang disampaikan dalam perkuliahan dengan realita yang terjadi dalam masyarakat. Demikian pula kendala yang cukup berpengaruh adalah kurang adanya sinkronisasi antara pembelajaran di lingkungan keluarga, masyarakat maupun kampus. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menanamkan pendidikan demokrasi pada mahasiswa, khususnya melalui pembelajaran di kelas. Sebagai panutan bagi mahasiswa untuk diteladani, dosen harus memberikan contoh yang baik agar mahasiswa memiliki sikap yang baik dan berusaha menciptakan lingkungan yang demokratis.

Partisipasi dan kesadaran akan Partisipasi dan pengakuan generasi muda akan pentingnya demokrasi harus dilandasi oleh kemauan dan niat untuk mencapai tujuan bersama (public goods). Oleh karena itu, sebagai generasi muda, mahasiswa berharap agar negara senantiasa aktif mewujudkan kehidupan demokrasi, menyampaikan aspirasi secara santun, mewujudkan demokrasi yang bermutu, dan muncul dengan sistem pemerintahan yang lebih baik.

Perguruan tinggi juga diharapkan mampu menciptakan dan

mengembangkan konsep dan kurikulum kewarganegaraan sesuai dengan standar kurikulum tingkat nasional. Pada tahap implementasi, para pengajar pendidikan kewarganegaraan perlu mengikuti perubahan dan pembaruan kurikulum untuk membekali diri sendiri dengan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menerapkan pendidikan kewarganegaraan di kampus. Demikian juga harus ada kesinambungan timbal balik antara keluarga, masyarakat dan kampus agar kita bisa menyatukan persepsi kita tentang penerapan nilai-nilai demokrasi yang benar.

Daftar Rujukan

- Akram, S., & Marsh, D. (2018). What is "Political" Participation. *Democratic Theory*, 5(2), 99–107. <https://doi.org/10.3167/dt.2018.050208>
- Bambang Yuniarto, 2020, *Membangun Kesadaran Demokrasi Melalui Pendekatan Kontekstual Pada Pembelajaran Pendidikan KWN*, EDUEKSOS : Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi p-IISN: 2252-9942 e-ISSN: 2548-5008, vol 8 no.1
- Diyan Nur Mellina, 2021, *Pembelajaran Pkn Sebagai Upaya Meningkatkan Civic Participation (Partisipasi Warga Negara)*, E Prosiding Seminar Nasional Virtual Pendidikan Kewarganegaraan 2021 "Tema Respon Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Menyambut Era Society 5.0"
- Eko Budiyo, 2015, *Kontribusi Mata Kuliah Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa*, Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam, Vol 6, No. 2

- Fiska Ilyasir, 2019, Jurnal Pembangunan dan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 7, No. 1, Juni 2019
<https://123dok.com/document/zggr96nz-pentingnya-pendidikan-demokrasi-feb.html>, diakses 1 Sept 2022
<https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ea35562f243/pengertian-demokratis-dalam-kehidupan-dan-kenegaraan-serta-contohnya>, diakses 2 September 2022
- Kadek Radhitya Vidianditha, 2019, *Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Untuk Meningkatkan Partisipasi Terhadap Pemilihan Umum Dalam Membangun Demokrasi*, Prociding Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha
- Nadiroh, 2015, *Membangun Masyarakat Demokrasi, Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an Vol. 2, Nomor 1, hlm. 263-266*
- Punaji, Setyosari, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pengembangan*, Jakarta, Kencana
- Satori, Djam'an, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta
- Stokamer, S. (2013). Pedagogical Catalysts of Hubungan pengetahuan kewarganegaraan dengan ... 367 Civic Competence : The Development of a Critical Epistemological Model for Community-Based Learning. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 17(1), 113–122.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, PT Remana Rosdakarya
- Supratiwi dkk, 2021, *Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pilkada Serentak*, Jurnal Pengabdian Vokasi: Vol II, No. 01
- Tukiran Taniredja dan Muhammad Abduh, 2016, *Pengembangan Nilai-Nilai Demokratis Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Jurnal PKn Progresif, Vol. 11 No. 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winarno, 2019, *Paradigma Baru Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT Bumi Aksara